



PNPM Mandiri untuk DIY Rp 112,1 M

JOGJA -- Pemerintah pusat mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2009, sebesar Rp 112,17 miliar untuk 78 kecamatan di DIY. Secara nasional, dana yang disiapkan untuk PNPM Mandiri tahun ini sekitar Rp 12 triliun.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Aburizal Bakrie menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam IX di Pen-

dopo Balaikota Timoho, Senin (9/2). Bantuan kemudian diteruskan kepada Walikota Yogyakarta, H Herry Zudianto dan para wakil bupati-sè-DIY yang menghadiri acara tersebut.

Jogja memperoleh Rp 11,49 miliar untuk PNPM Mandiri Perkotaan di 14 kecamatan, Bantuan Rp 12,18 miliar untuk PNPM Mandiri Perkotaan di 12 kecamatan dan Rp 9,9 miliar untuk PNPM Mandiri Perdesaan di 5 kecamatan, Gunung Kidul Rp 39,2 miliar untuk PNPM Mandiri

>> KE HAL 7

PNPM Mandiri untuk DIY Rp 112,1 M

Sambungan dari halaman 1

Perdesaan di 18 Kecamatan.

Kemudian Sleman Rp 14,9 miliar untuk PNPM Mandiri Perkotaan di 15 kecamatan dan Rp 2,9 miliar untuk PNPM Mandiri Perdesaan di 2 kecamatan. Sedangkan Kulonprogo memperoleh Rp 1,4 miliar untuk PNPM Mandiri Perkotaan di 1 kecamatan dan Rp 20,20 M untuk PNPM Mandiri Perdesaan di 11 kecamatan.

Menko yang akrab dipanggil Ical itu mengutarakan, tahun ini, alokasi dana PNPM untuk perkotaan lebih besar ketimbang perdesaan. Alasannya, pemerintah menilai angka kemiskinan di perdesaan lebih cepat turun dibandingkan dengan di perkotaan.

"PNPM ini akan kita selesaikan pada tahun 2015. Pada tahun itu, kita harapkan in-

frastruktur perdesaan sudah baik semua, dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya kita mulai pindah ke klaster ke-3, melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat atau KUR," jelasnya.

Dikatakan, PNPM Mandiri tahun lalu mencakup 36 ribu desa se-Indonesia, tahun ini 78 ribu desa se-Indonesia. Mengenai cakupan tenaga kerja, PNPM dan KUR tahun lalu menyerap 14,4 juta orang tenaga kerja. Sedangkan tahun ini ditargetkan bisa menciptakan 26 juta lapangan kerja baru.

Dia berharap korban PHK bisa terserap lapangan kerja baru dari pengucuran dana PNPM Mandiri dan KUR. Meskipun ketersediaannya tidak 1 tahun penuh, melainkan hanya saat program-program tersebut berjalan.

Sementara itu, sesuai acara penyerahan bantuan, Ical memberikan keterangan, pemerintah akan melakukan moratorium pemekaran daerah. Moratorium dilakukan karena tidak seluruh pemekaran menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah hasil pemekaran.

"Pemekaran harus diimbangi PAD yang signifikan. Kalau PAD tidak ada, dana bagi hasil tidak ada. Kalau pertambahan tidak ada, ngapain dimekarkan? Jadi harus ada pertimbangan," tandasnya.

Ditambahkan, pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus dalam bentuk apapun terhadap daerah hasil pemekaran. Perlakuan khusus hanya diberikan kepada daerah terganggu. (fir)

an Ke
Wakil
Sekre
Asisten

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005